

HARVEST STRATEGY DALAM KONSERVASI PERIKANAN: KESENJANGAN ANTARA KEBIJAKAN DAN REALITAS NELAYAN LOKAL DI PERAIRAN MAKASSAR

Raihana Dzakira Sudirman, Darwis, Wira Atman

Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

Email: raihanadzakiras@gmail.com,

darwis.hi@unhas.ac.id,

dukeofrappang@mail.ugm.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganeshia.



Abstrak

Keberlanjutan konservasi perikanan menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan pemeliharaan kelestarian ekosistem laut. Salah satu pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah *Harvest Strategy*, sebuah kebijakan pengelolaan perikanan yang berlandaskan pada data ilmiah serta prinsip keberlanjutan. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan secara nasional, realitanya implementasi di lapangan terutama di wilayah pesisir seperti Makassar, masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan *Harvest Strategy* dan praktik nelayan lokal di perairan Makassar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nelayan di wilayah tersebut belum sepenuhnya memahami konsep keberlanjutan yang terkandung dalam kebijakan ini. Selain itu, keterbatasan dalam sosialisasi, pelatihan, serta akses informasi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya lebih lanjut

dalam meningkatkan komunikasi kebijakan dan melibatkan nelayan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perikanan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat implementasi *Harvest Strategy* dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

Kata kunci: harvest strategy, keberlanjutan, konservasi perikanan, nelayan lokal, makassar

Abstract

The sustainability of fisheries conservation is a crucial aspect in maintaining the balance between the exploitation of fisheries resources and the preservation of marine ecosystems. One of the approaches applied to achieve this goal is *Harvest Strategy*, a fisheries management policy based on scientific data and sustainability principles. Although this policy has been implemented nationally, the reality is that implementation in the field, especially in coastal areas such as Makassar, still faces a number of challenges. This study aims to identify the gap between the *Harvest Strategy* policy and the practices of local fishermen in the Makassar region. The research findings show that the majority of fishermen in the region do not fully understand the concept of sustainability contained in this policy. In addition, limitations in socialization, training, and access to information are inhibiting factors in the implementation of the policy. This research recommends the need for further efforts in improving regulations communication and actively involving fishermen in the planning and implementation process of fisheries policies. This is expected to strengthen the implementation of the *Harvest Strategy* and support the sustainability of the fisheries sector in Indonesia.

Keyword: harvest strategy, sustainability, fisheries conservation, local fishermen, makassar

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan mencapai lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang sangat besar. Dua pertiga wilayahnya berupa perairan laut dengan sumber daya lautnya menjadi fondasi utama bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sekitar 140 juta

penduduk tinggal di kawasan pesisir, memanfaatkan laut sebagai sumber pangan, mata pencaharian, transportasi, dan rekreasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Selain pemenuhan kebutuhan domestik, sektor perikanan laut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendukung pengembangan industri berbasis perikanan, serta mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi sangat penting. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang seimbang antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga sumber daya laut tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang

Merujuk pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat 17 tujuan utama yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Salah satu tujuan yang sangat relevan bagi Indonesia adalah SDG 14, yang berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 6,4 juta km², yang mencakup sekitar 77% dari total luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mencapai 8,4 juta km². Dengan garis pantai sepanjang 108.000 km, Indonesia memiliki hak istimewa sekaligus tanggung jawab besar dalam mengelola laut dan ekosistemnya (Djunarsjah & Fakhrurozi, 2024). SDG 14 bertujuan menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi, dengan menekankan pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab. Bagi Indonesia, implementasi tujuan ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian ekosistem laut, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir yang memerlukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengancam kesejahteraan generasi mendatang.

Perikanan laut Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, menghadapi berbagai tantangan serius, seperti penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), kerusakan ekosistem laut, hingga ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan nelayan tradisional. Praktik penangkapan ikan yang tidak terkelola dengan baik selama bertahun-tahun telah menyebabkan penurunan stok ikan secara signifikan, menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi nelayan, serta mengancam kelestarian ekosistem laut (Nurlaela, 2023). Sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/Kepmen-KP/2017, sebanyak 38% Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami penangkapan berlebih (*overfishing*), sementara 44% lainnya berada pada status penangkapan penuh (*fully-fishing*) (Adhiem, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih efektif dalam mencegah keruntuhan sektor perikanan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menjadi 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan (Pratiwi dkk., 2022). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut. WPP-NRI 713, yang mencakup perairan di sekitar Makassar, merupakan salah satu kawasan strategis dalam sektor perikanan nasional. Perairan ini kaya akan sumber daya ikan, termasuk ikan karang yang menjadi komoditas utama bagi nelayan setempat. Namun, tingkat pemanfaatan ikan karang di WPP-NRI 713 saat ini telah memasuki status pemanfaatan berlebih (*over-exploited*). Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan stok ikan secara drastis dan mengancam keberlanjutan perikanan di kawasan tersebut. Untuk mencegah keruntuhan ekosistem perikanan, diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem laut dan menjamin kelangsungan stok ikan untuk mendukung kebutuhan ekonomi lokal (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022).

FAO menekankan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang mencakup pengelolaan yang bijaksana, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Primasari dkk., 2024). Salah satu pendekatan pengelolaan yang mulai diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Strategi

Pemanfaatan (*Harvest Strategy*). Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai *Management Procedure* atau *Harvest Management* yang bertujuan menjaga keberlanjutan stok ikan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia (Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia [MDPI], 2024). *Harvest Strategy* mengacu pada proses formal dalam menetapkan keputusan pengelolaan berbasis ilmiah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di sektor perikanan. Di tingkat global, pendekatan ini telah diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia (Yao dkk., 2021).

Upaya penerapan *Harvest Strategy* di Indonesia mulai dirintis pada tahun 2014 sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam keanggotaan di organisasi manajemen perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organizations*, RFMO). Langkah ini dipertegas pada tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 107/2015, yang secara resmi menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya (Doaly, 2022). Inti dari kebijakan ini adalah serangkaian prosedur pengelolaan yang menentukan peluang penangkapan ikan, seperti batas tangkapan atau upaya penangkapan, berdasarkan perkiraan kondisi stok ikan, termasuk biomassa terkini (Destructive Fishing Watch, 2024). Implementasi langkah-langkah pemantauan, penilaian, dan pengelolaan merupakan elemen penting dari *Harvest Strategy* untuk mencapai sertifikasi perikanan dengan standar internasional untuk keberlanjutan (Satria dkk., 2019).

Kerangka kerja *Harvest Strategies* dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk MDPI (Marine Stewardship Council), sebagai pedoman untuk memastikan pengelolaan perikanan yang lebih efektif. Dalam kerangka ini, lima langkah prioritas dipilih untuk diimplementasikan, yaitu: pembatasan penggunaan rumpon, penutupan daerah pemijahan ikan serta penutupan sementara wilayah tertentu, pengaturan jumlah hari penangkapan, pembatasan jumlah kapal yang diizinkan beroperasi, dan penetapan batas maksimal hasil tangkapan (*Total Allowable Catch*, TAC) di setiap WPP-NRI (Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia [MDPI], 2023). Penerapan *Harvest Strategy* di Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan pengelolaan tidak hanya berbasis ilmiah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya di beberapa wilayah pesisir seperti Makassar. Di kawasan ini, realitas kehidupan nelayan sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan kebijakan nasional maupun global. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual diperlukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara kebijakan *Harvest Strategy* yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di wilayah Makassar. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana nelayan lokal memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap akar permasalahan yang menghambat keberhasilan kebijakan, sekaligus memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan di wilayah Makassar. Dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem laut tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kesenjangan antara kebijakan *Harvest Strategy* dan realitas yang dihadapi oleh nelayan di wilayah perairan Makassar. Metode ini dianggap mampu untuk menggali perspektif mendalam dari para nelayan mengenai pemahaman dan pengalaman mereka terhadap kebijakan pengelolaan perikanan. Penelitian

dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Pelabuhan Paotere dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali, yang merupakan pusat aktivitas nelayan di Makassar.

Subjek penelitian ini adalah nelayan yang beraktivitas di kedua lokasi tersebut. Nelayan dipilih sebagai subjek utama karena mereka adalah pihak yang langsung terdampak oleh kebijakan pengelolaan perikanan, termasuk *Harvest Strategy*. Dengan fokus pada nelayan, penelitian ini berupaya menggali pandangan mereka terkait kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam praktik perikanan, serta kemungkinan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data menggunakan dua metode utama yakni wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan nelayan di lokasi penelitian untuk memahami pengalaman, persepsi, dan tingkat pemahaman mereka terhadap *Harvest Strategy*. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan pemerintah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi pedoman wawancara yang digunakan untuk wawancara mendalam, serta dokumen pemerintah dan literatur terkait untuk mendukung analisis data. Pedoman wawancara dirancang untuk memastikan pengumpulan data primer yang relevan dan mendalam mengenai pemahaman nelayan terhadap kebijakan *Harvest Strategy*. Selain itu, studi literatur memanfaatkan dokumen-dokumen seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan peraturan pemerintah untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung analisis kebijakan pengelolaan perikanan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan, menginterpretasi, dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kebijakan *Harvest Strategy* dan kondisi nyata yang dihadapi oleh nelayan lokal, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengelolaan perikanan secara lebih efektif dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas nelayan yang beroperasi di Pelabuhan Paotere dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali tidak mengenal kebijakan *Harvest Strategy*. Temuan ini menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara kekuatan nasional yang telah dirumuskan dan tingkat pemahaman di kalangan nelayan lokal yang menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketidakpemahaman ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan belum berhasil menjangkau komunitas yang terdampak secara langsung. Dalam wawancara, meskipun nelayan mengetahui beberapa aturan seperti jenis ikan yang dilarang untuk ditangkap, pemahaman mereka terbatas pada peraturan formal tanpa memahami konsep keberlanjutan atau dampaknya terhadap ekosistem laut. Situasi ini mencerminkan tantangan dalam komunikasi kebijakan yang merujuk pada kurang optimalnya sosialisasi di tingkat lokal. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat implementasi *Harvest Strategy* tetapi juga mengurangi efektivitas langkah-langkah konservasi yang dirancang untuk melindungi stok ikan dan ekosistem laut.

Dalam konteks kebijakan, kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun *Harvest Strategy* didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan keberlanjutan, pada kenyataannya penerapan yang dilakukan tidak mempertimbangkan sepenuhnya realitas sosial, ekonomi, dan kapasitas pengetahuan komunitas nelayan lokal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap *Harvest Strategy* berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan perikanan berbasis keberlanjutan. Beberapa nelayan bahkan menganggap kebijakan-kebijakan yang membatasi jumlah tangkapan mereka hanya dapat merugikan secara ekonomi, karena hanya sekedar pembatasan tanpa menawarkan solusi alternatif yang jelas. Nelayan hanya berfokus pada kebutuhan ekonomi harian sehingga

cenderung memprioritaskan hasil tangkapan jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang pada ekosistem laut.

Minimnya akses terhadap informasi dan pelatihan membuat mereka sulit memahami pentingnya kebijakan *Harvest Strategy* dalam menjaga kelangsungan perikanan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Meskipun dalam laporan tahunan MDPI 2023 (Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia [MDPI], 2024) mencatat bahwa MDPI telah berperan dalam menyebarluaskan informasi dan melakukan sosialisasi terkait Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) melalui Komite Pengelola Bersama Perikanan, pada kenyataannya, nelayan di wilayah Makassar masih belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya sosialisasi di tingkat tertentu, masih terdapat kesenjangan dalam menjangkau komunitas nelayan lokal yang menjadi pihak utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemahaman yang minim ini membuat praktik perikanan di perairan Makassar cenderung masih eksploitatif, tanpa strategi pengelolaan yang terarah.

Kesenjangan yang terjadi antara kebijakan *Harvest Strategy* dan pemahaman nelayan di Makassar menunjukkan adanya tantangan besar dalam komunikasi kebijakan yang efektif. Keterbatasan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh kurangnya partisipasi aktif nelayan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan tersebut. Ketidakhahaman tentang dampak jangka panjang kebijakan terhadap ekosistem laut dan kelangsungan perikanan menyebabkan nelayan lebih fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, sementara dampak jangka panjang terhadap stok ikan dan kelestarian laut seringkali terabaikan.

Kampanye Informasi yang Intensif

Untuk mengatasi tantangan yang ada, perlu upaya dalam meningkatkan keterlibatan nelayan dalam pengelolaan perikanan secara lebih inklusif. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah kampanye informasi yang intensif. Kampanye ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pengelolaan perikanan, seperti *Harvest Strategy*, kepada nelayan dan masyarakat pesisir. Salah satu hambatan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya pemahaman nelayan mengenai alasan dan tujuan di balik kebijakan tersebut. Dengan menggelar penyuluhan, seminar, dan lokakarya secara rutin, nelayan dapat diberikan pengetahuan mendalam tentang pentingnya menjaga keberlanjutan stok ikan dan ekosistem laut. Kampanye informasi ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis lokal sehingga penampaiannya dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat agar lebih mudah dipahami oleh nelayan.

Pelatihan dan Pendidikan untuk Nelayan

Upaya yang kedua yakni melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan. Program ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman dasar pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan, teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya ikan, dan pengelolaan usaha perikanan. Selain itu, pelatihan tentang manajemen keuangan dan usaha perikanan akan membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola penghasilan secara lebih baik. Langkah ini bertujuan untuk membekali nelayan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka

Pendampingan Teknis yang Berkelanjutan

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan strategi pemanfaatan yakni pendampingan teknis. Pendampingan teknis menjadi elemen penting untuk mendukung nelayan dalam beradaptasi dengan kebijakan baru, seperti *Harvest Strategy*. Dalam pendampingan ini, para ahli dapat membantu nelayan memahami dan mengaplikasikan teknologi atau teknik baru dalam penangkapan ikan, sehingga produktivitas

mereka tetap terjaga (Hernawan dkk., 2021). Sebagai contoh, pendampingan dapat meliputi cara menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan atau memaksimalkan hasil tangkapan tanpa merusak ekosistem. Selain itu, pendampingan ini juga dapat melibatkan pelatihan tentang prosedur perizinan yang lebih efisien, sehingga nelayan tidak merasa terbebani oleh proses administrasi. Langkah ini juga dapat disertai dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas penanganan ikan, seperti tempat penyimpanan dingin atau area pembersihan ikan, yang mendukung efisiensi dan kualitas hasil tangkapan.

Sistem Pemantauan untuk Evaluasi Kebijakan

Pengembangan sistem pemantauan yang efektif sangat penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengelolaan perikanan secara berkala. Sistem ini dapat mencakup pengumpulan data tentang jumlah tangkapan, kesehatan stok ikan, dan kondisi ekosistem laut. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau dampak yang tidak diinginkan, kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Selain itu, sistem pemantauan ini juga dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan nelayan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga keberlanjutan perikanan dapat tercapai secara menyeluruh.

Pendekatan-pendekatan ini, jika diterapkan secara terpadu, tidak hanya akan meningkatkan kemampuan nelayan untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tetapi juga mendorong terciptanya pengelolaan perikanan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, baik nelayan maupun ekosistem laut dapat memperoleh manfaat jangka panjang yang signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan *Harvest Strategy* di Indonesia sudah diterapkan untuk menjaga keberlanjutan perikanan, realitanya masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya, terutama di tingkat lokal. Di Pelabuhan Paotere dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali, Makassar, mayoritas nelayan tidak sepenuhnya memahami kebijakan ini. Meskipun mereka mengetahui beberapa peraturan dasar, seperti larangan menangkap ikan muda atau spesies yang dilindungi, pemahaman mereka terbatas pada aspek teknis tanpa memahami konsep keberlanjutan dan dampaknya terhadap ekosistem laut.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kondisi perikanan di WPPNRI 713, yang mencakup perairan Makassar, berada dalam status pemanfaatan berlebihan (*over-exploitation*). Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan stok ikan yang drastis dan merusak ekosistem laut. Untuk mencegah keruntuhan sektor perikanan, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pengurangan upaya penangkapan ikan dan pengawasan yang lebih ketat, agar keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga.

Pengelolaan sumber daya perikanan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan nelayan agar lebih efektif dan relevan. Peningkatan penyuluhan mengenai keberlanjutan serta partisipasi aktif nelayan dalam kebijakan perikanan menjadi kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif untuk memastikan kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat lokal, sehingga keberlanjutan perikanan dapat tercapai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pengelolaan perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir seperti Makassar, guna menjaga kelestarian sumber daya laut untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Djunarsjah, E., & Fakhrurozi, H. A. Peran Geodesi Dan Geomatika Dalam Implementasi Sustainable Developmentgoals Nomor 14 Di Indonesia. *Kokoh*, 19(2), 69-86.

- Doaly, T. (2022). Mengulik Harvest Strategy Tuna di Indonesia. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2022/08/18/mengulik-harvest-strategy-tuna-di-indonesia>
- Fishery Progress, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: Pertemuan Ke-2 Stakeholder dalam rangka Implementasi Harvest Strategy Perikanan Tuna di WPP-NRI 713, 714 dan 715, *Fishery Progress*, Bogor, 2019, p.1.
- Hernawan, D., Purnomo, A. M., & Purnamasari, I. (2021). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 631-638.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ed.). 2020. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia: Status dan Tantangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan WWF Indonesia. Jakarta, Indonesia. DOI: 10.6084/m9.figshare.13341503
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Strategi pemanfaatan (harvest strategy) kakap (snapper) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- M.A. Adhiem, 'Tantangan Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur,' *dpr.go.id* (daring), 2023, <https://berkas.dpr.go.id>, diakses 10 Desember 2024.
- Nurlaela, E. (2023). Penangkapan Ikan Terukur : Tantangan dan Penerapan. National Research and Innovation Agency. p. 269. DOI: <https://doi.org/10.55981/brin.908.c819>
- Orofino, S., McDonald, G., Mayorga, J., Costello, C., & Bradley, D. (2023). Opportunities and challenges for improving fisheries management through greater transparency in vessel tracking. *ICES Journal of Marine Science*, 80(4), 675–689. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad008>
- Pratiwi, Y. D., Saputra, D. E., Tallo, D. K. O., & Dewanti, E. T. (2022). Politik hukum penetapan wilayah pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur dalam pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), 362-385.
- Primasari, K., Melumpi, M. H., Widya Yanti, D. I., & Manurung, M. (2024). *Eksplorasi Dunia Kelautan dan Potensi Perikanan: Panduan Komprehensif tentang Kehidupan Laut dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. PT Media Penerbit Indonesia, p. 12.
- Satria, F., Sadiyah, L., Yunanda, T., & Suadela, P. (2019). Harvest strategies for tropical tuna in archipelagic waters of Indonesia: Update. *Fifteenth Regular Session of the Scientific Committee of WCPFC. Pohnpei, Federated States of Micronesia*, 12-20.
- 'Sekilas Tentang Harvest Strategy Tuna,' Destructive Fishing Watch (daring), 2024, tersedia di: <https://dfw.or.id/sekilas-tentang-harvest-strategy-tuna/> (diakses 10 Desember 2024).
- Yao N., Scott R., Scott F., Hamer P. 2021. Harvest strategies - the future of tuna fisheries management in the western and central Pacific. SPC Fisheries Newsletter 165:7–9. <https://www.spc.int/digitallibrary/get/zkgdb>.
- Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). (2023). *Berkembang dengan Belajar: Laporan Tahunan 2022*. MDPI.
- Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). (2024). *Bersama Berdampak: Laporan Tahunan 2023*. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).